

Pasar Ilegal Sore di Lauru Ditertibkan Tim Terpadu

Bombana, Sultranet.com - Aktivitas pasar ilegal sore yang selama ini meresahkan warga di Jalan Pattimura, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, resmi ditertibkan oleh tim terpadu pada Jumat (14/03/2025) sore. Operasi ini melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah Kabupaten Bombana, mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perindagkop, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PTSP, hingga aparat TNI-Polri, serta pihak Kecamatan Rumbia Tengah dan Kelurahan Lauru.

Penertiban ini menyoasar pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan bahu jalan, mendirikan lapak tanpa izin, serta memarkir kendaraan secara sembarangan yang menyebabkan kemacetan. Jalan Pattimura yang selama ini menjadi titik sentral aktivitas perdagangan liar, kini mulai dibersihkan dan ditata kembali untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar sebagai fasilitas umum.

“Masih banyak pedagang yang nekat berjualan di atas trotoar dan badan jalan. Ini jelas melanggar aturan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas,” ujar La Ode Sahidun, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Bombana, saat ditemui di lokasi.

Menurut La Ode Sahidun, penertiban ini bukan langkah mendadak. Pemerintah daerah bersama tim terpadu sebelumnya telah melakukan sosialisasi, menyampaikan himbauan, serta memberikan peringatan kepada para pedagang agar berpindah ke zona resmi.

“Kami arahkan para pedagang ke pasar Tadoha Mapaccing di Desa Tapuahi. Di sana sudah tersedia fasilitas yang layak dan aman untuk berjualan. Kalau masih membandel, sanksi tegas akan diberlakukan,” tegasnya.

Pasar Tadoha Mapaccing yang menjadi lokasi relokasi, menurut pemerintah, dirancang untuk menampung seluruh aktivitas niaga warga dengan lebih tertib. Pemerintah daerah berharap pendekatan persuasif dan edukatif yang telah dilakukan sebelumnya bisa mendorong kepatuhan para pedagang.

Kepala Dinas Perindagkop Bombana, Azis Fair, menyampaikan bahwa pihaknya

akan terus melakukan pembenahan kawasan pasar agar bisa memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli.

“Kami berharap para pedagang bisa memanfaatkan fasilitas resmi yang telah disiapkan. Pasar Tadoha Mapaccing ini dibangun untuk mendukung ekonomi warga, bukan untuk dikosongkan,” kata Azis.

Penertiban pasar ilegal sore di Kelurahan Lauru ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan meningkatkan kualitas tata kota. Keberadaan pasar liar yang tak tertata, selain menyalahi aturan, juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan dan menurunkan nilai estetika lingkungan kota.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa kegiatan seperti ini akan dilakukan secara berkala, dengan pendekatan yang tetap mengedepankan sisi kemanusiaan. Aparat di lapangan juga dibekali dengan pendekatan komunikasi yang humanis untuk meminimalkan gesekan dan membangun kesadaran masyarakat.

Lurah Lauru, Ilyas, yang turut hadir dalam kegiatan ini, mengapresiasi keterlibatan semua unsur dalam penertiban tersebut. Ia berharap warga bisa memahami bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman.

“Ini untuk kebaikan kita bersama. Ketika lingkungan bersih, tertata dan tidak semrawut, semua orang akan merasakan manfaatnya,” ujar Ilyas.

Camat Rumbia Tengah, Rahmat Saleh, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat merupakan kunci utama suksesnya penataan ruang publik.

“Kami akan terus mendampingi warga, khususnya para pedagang, agar bisa beraktivitas ekonomi tanpa mengganggu ketertiban umum. Pemerintah bukan melarang orang mencari nafkah, tapi menata agar semua tertib dan nyaman,” ucap Rahmat.

Dengan penertiban ini, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi pasar ilegal baru yang muncul di titik-titik lain. Penataan ruang publik dan zona niaga yang tertib dinilai sangat penting demi terciptanya kota yang ramah bagi semua.

Pasar Ilegal Sore Ditertibkan, PKL Diminta Pindah ke Lokasi Resmi

Bombana, Sultranet.com - Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Bombana menertibkan Pasar Ilegal Sore yang berada di Jalan Pattimura, Kelurahan Luru, Kecamatan Rumbia Tengah, Jumat, 14 Maret 2025. Penertiban menyasar pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar, bahu jalan, lapak-lapak liar, serta kendaraan parkir sembarangan yang kerap menimbulkan kemacetan di kawasan tersebut.

Kegiatan ini melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), aparat TNI-Polri, serta pemerintah Kecamatan Rumbia Tengah.

“Kami menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sebelumnya. Penertiban ini merupakan upaya menjaga ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas,” kata La Ode Sahidun, S.Si, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Bombana saat ditemui di lokasi.

Menurutnya, meski imbauan sudah berulang kali disampaikan, masih banyak pedagang yang tetap nekat berjualan di atas trotoar dan badan jalan. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu pengguna jalan, tetapi juga menyalahi aturan perundang-undangan tentang ketertiban umum dan pemanfaatan fasilitas publik.

“Sudah sering kami beri peringatan secara persuasif. Tapi sebagian pedagang tetap memilih berjualan di area terlarang. Kalau begini terus, tentu akan ada sanksi lebih tegas,” ujarnya.

Sebelum tindakan penertiban dilakukan, Tim Terpadu telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang agar mereka dapat berpindah ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah, yakni Pasar Tadoha Mapaccing di Desa Tapuahi, yang masih berada di wilayah Kecamatan Rumbia Tengah.

Pasar tersebut, menurut Dinas Perindagkop Bombana, dibangun sebagai solusi jangka panjang agar pedagang kaki lima memiliki lokasi yang layak dan aman, sekaligus mendorong terciptanya pusat ekonomi yang lebih tertata dan terorganisir.

“Kami harap semua pedagang bisa memanfaatkan pasar resmi ini. Fasilitas sudah kami sediakan. Jangan ada lagi alasan untuk berjualan di tempat yang melanggar aturan,” ujar Azis Fair, Kepala Dinas Perindagkop Bombana.

Azis menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak melarang aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan ingin memastikan semua kegiatan berjalan dalam koridor aturan serta tetap menjaga keindahan dan keteraturan kota.

Ia juga menambahkan bahwa Pasar Tadoha Mapaccing telah dilengkapi dengan fasilitas umum seperti los dagang, tempat parkir, sanitasi, serta sistem pengelolaan sampah, agar pedagang dan pengunjung merasa lebih nyaman.

“Dengan relokasi ini, kami berharap terjadi pemerataan ekonomi dan kenyamanan berbelanja bagi masyarakat,” ujarnya.

Tim Terpadu menyatakan bahwa penertiban akan terus dilakukan secara berkala. Fokusnya bukan hanya pada pembongkaran lapak ilegal, tetapi juga pengawasan parkir liar dan perbaikan sistem lalu lintas di kawasan padat.

Masyarakat sekitar pun menyambut positif langkah ini. Beberapa warga menilai aktivitas pasar sore di Jalan Pattimura kerap menimbulkan kemacetan dan tumpukan sampah yang tidak terkelola.

“Kalau bisa dipindah ke tempat resmi, kenapa harus ganggu jalan umum? Kami sebagai pengguna jalan jadi susah lewat, belum lagi baunya kalau sore,” ujar Andi, warga Kelurahan Lauru.

Penertiban pasar ilegal ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata wajah kota Rumbia sebagai pusat administrasi dan ekonomi Kabupaten Bombana. Program ini akan terus dikawal oleh lintas sektor, termasuk aparat keamanan, demi menjaga keberlanjutan dan kedisiplinan pelaku usaha mikro dan kecil.

Dengan tindakan tegas namun humanis ini, pemerintah berharap pedagang dapat memahami bahwa keteraturan kota adalah tanggung jawab bersama. Menata

pasar bukan sekadar urusan estetika, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan tertib bagi semua pihak.

Ramadhan Berbagi, BAZNAS Kolaka Utara Salurkan Zakat Rp1,19 Miliar

Kolaka Utara, sultranet.com - Wujud semangat berbagi di bulan suci Ramadan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara menyalurkan zakat sebesar Rp1.197.000.000 kepada 2.793 mustahik yang terdiri dari fakir dan miskin. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan. Penyaluran zakat ini dilakukan secara bertahap, mengikuti jadwal Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Ketua BAZNAS Kolaka Utara, Ajmal Arif, menjelaskan bahwa bantuan diberikan dalam dua kategori, yaitu fakir dan miskin. Fakir menerima bantuan sebesar Rp500.000 per orang dengan total penerima 798 orang, sementara kategori miskin mencakup 1.995 penerima dengan masing-masing mendapatkan Rp400.000.

“Untuk fakir, kami berikan Rp500.000 per orang dengan total penerima sebanyak 798 orang. Sementara kategori miskin, ada 1.995 penerima, masing-masing mendapatkan Rp400.000,” ujar Ajmal saat penyaluran zakat di Kecamatan Ranteangin. Jum’at (14/3/2025)

Selain bantuan bagi fakir dan miskin, BAZNAS Kolaka Utara juga menyalurkan santunan kepada marbot masjid di tingkat kecamatan. Total 15 marbot menerima bantuan, masing-masing sebesar Rp1.000.000, dengan total alokasi dana Rp15.000.000.

Penyaluran zakat ini dilakukan selama sembilan hari dan mencakup 15

kecamatan di Kolaka Utara. Mekanismenya mengikuti jadwal Safari Ramadan yang ditetapkan pemerintah daerah. Jika dalam satu hari ada dua kecamatan yang dikunjungi, maka distribusi zakat dilakukan di dua kecamatan tersebut.

“Setiap hari kami mendistribusikan zakat sesuai dengan jadwal safari. Jika ada dua kecamatan yang dikunjungi, maka kami salurkan di dua kecamatan tersebut. Jika hanya satu, maka hanya di satu kecamatan itu saja,” jelasnya.

Dalam proses pendataan penerima zakat, BAZNAS Kolaka Utara terlebih dahulu bersurat ke kecamatan untuk meminta kepala desa dan lurah mengirimkan data calon penerima. Data tersebut kemudian diverifikasi guna memastikan bahwa mereka benar-benar memenuhi kriteria sebagai mustahik. Fakir didefinisikan sebagai mereka yang sama sekali tidak memiliki penghasilan dan bergantung pada bantuan orang lain, sementara miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

“Fakir adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki penghasilan dan bergantung pada bantuan orang lain, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya,” tambah Ajmal.

BAZNAS juga berupaya agar penerima zakat ini adalah mereka yang belum mendapatkan bantuan sosial lain, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk itu, koordinasi dilakukan dengan kepala desa agar bantuan lebih tepat sasaran.

“Kami meminta kepada kepala desa untuk memprioritaskan mereka yang belum menerima bantuan lain. Namun, jika tidak ada lagi fakir dan miskin yang belum mendapat BLT misalnya, maka data yang ada tetap menjadi acuan,” kata Ajmal.

Penyaluran zakat ini dilakukan dalam dua tahap setiap tahunnya, yakni saat Ramadan dan menjelang akhir tahun. Skema ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami harap zakat ini bisa membantu meringankan beban masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan,” pungkasnya.

Dinas PUPR dan DPRD Bombana Tinjau Sungai di 2 Kecamatan

Bombana, Sultranet.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana bersama anggota DPRD Bombana meninjau sejumlah titik banjir di Kecamatan Poleang Timur dan Poleang Utara. Peninjauan ini merupakan respons cepat pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat yang terdampak banjir di beberapa wilayah. (14/3)

Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain Kelurahan Puu Lemo di Kecamatan Poleang Timur serta Kelurahan Puulemo, Desa Toburi, dan Desa Wambarema di Kecamatan Poleang Utara. Selain melihat kondisi permukiman warga yang terdampak, tim juga meninjau beberapa sungai yang diduga menjadi penyebab utama banjir di wilayah tersebut.

Peninjauan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Bombana, Ir. Ishak, ST, MT, Camat Poleang Timur, serta anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad. Kehadiran mereka di lapangan bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama banjir dan mencari solusi penanganan jangka panjang.

Banjir yang sering terjadi di kedua kecamatan ini menyebabkan sejumlah rumah warga tergenang air dan menghambat akses jalan utama. Saluran drainase yang tidak berfungsi optimal serta sedimentasi di beberapa sungai menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi.

Ir. Ishak mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian teknis untuk menentukan langkah strategis dalam menangani banjir, termasuk kemungkinan normalisasi sungai dan pembangunan drainase tambahan.

“Kami turun langsung ke lokasi untuk memahami kondisi di lapangan. Dengan data yang kami kumpulkan, kami akan merumuskan solusi yang efektif agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Ir. Ishak.



Di sisi lain, anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan legislatif dalam menangani permasalahan banjir. Ia menilai bahwa infrastruktur drainase yang lebih baik merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan.

“Kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama dalam penanggulangan banjir. Infrastruktur yang baik adalah solusi jangka panjang yang harus kita perjuangkan bersama,” kata Yudi Utama Arsyad.

Camat Poleang Timur juga menambahkan bahwa pemerintah kecamatan akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan upaya mitigasi berjalan optimal. Ia mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan di saluran air.

“Jika pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama dengan baik, kami yakin permasalahan banjir ini dapat diatasi secara bertahap,” ujar Camat Poleang Timur.

Peninjauan ini menjadi langkah awal dalam perencanaan strategi penanganan banjir yang lebih komprehensif. Dinas PUPR Bombana berencana melakukan evaluasi terhadap kondisi drainase dan aliran sungai di wilayah terdampak. Salah satu opsi yang akan dipertimbangkan adalah pengerukan sungai serta peningkatan kapasitas saluran air untuk mengurangi risiko banjir.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan mencegah penyumbatan drainase. Dengan langkah-langkah yang terencana dan kerja sama semua pihak, diharapkan banjir yang kerap terjadi dapat diminimalisir di masa mendatang.

Sunandar A. Rahim Dilantik sebagai Pj. Sekda Bombana

BOMBANA, sultranet.com - Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, resmi melantik dr. H. Sunandar A. Rahim, M.Kes sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Tanduale Sekretariat Daerah Bombana, Jumat (14/3/2025), dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah memiliki peran strategis dalam pemerintahan daerah, terutama dalam membantu kepala daerah menjalankan kebijakan serta mengoordinasikan program pembangunan. Ia berharap Pj. Sekda yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menjaga sinergi antarlembaga, dan meningkatkan kinerja birokrasi.

“Sebagai Sekda, tugas utama yang diemban adalah memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Saya berharap Pak Sunandar dapat mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab,” ujar Burhanuddin.



Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/78 Tahun 2025, tertanggal 7 Maret 2025. Dengan penunjukan ini, dr. H. Sunandar A. Rahim diharapkan dapat segera bekerja dan menyesuaikan diri dengan dinamika pemerintahan di Bombana.

Dalam keterangannya usai dilantik, Sunandar menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk mengemban amanah dengan penuh dedikasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh elemen pemerintahan untuk memastikan kebijakan daerah dapat berjalan optimal.

“Saya akan berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan tugas ini dan memastikan sinergi antarlembaga tetap terjaga. Semua ini demi kemajuan Bombana dan kesejahteraan masyarakat,” kata Sunandar.

Pelantikan ini menjadi momen penting dalam struktur pemerintahan Kabupaten Bombana, mengingat posisi Sekda memiliki peran krusial dalam menjalankan kebijakan daerah. Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki Sunandar, diharapkan roda pemerintahan semakin solid dan mampu menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

RKPD Bombana 2026 Mulai Disusun, Akomodir Visi Misi BERANI

Bombana, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Aula Kantor Bappeda Bombana, Kamis (14/3/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., serta dihadiri para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Kasubag Perencanaan OPD.

Forum ini menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terkait arah pembangunan daerah pada tahun 2026. RKPD yang tengah disusun ini mengakomodir visi dan misi pemerintahan Burhanuddin-Ahmad Yani (*BERANI*), dengan mengusung tema *Peningkatan Ekonomi Berbasis Agrominapolitan Didukung Infrastruktur dan SDM Berkualitas*.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menegaskan bahwa Bombana memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan yang harus dimanfaatkan secara optimal. Dengan perencanaan yang matang, RKPD 2026 diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi berbasis Agrominapolitan.

“Kabupaten Bombana memiliki sumber daya alam melimpah dan produk pertanian serta perikanan berkualitas. RKPD ini harus mampu memaksimalkan potensi tersebut secara berkelanjutan agar sektor pertanian dan perikanan semakin berkembang,” kata Burhanuddin.



Selain sektor pertanian dan perikanan, pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian utama pemerintah. Infrastruktur yang memadai dinilai akan mempercepat distribusi hasil pertanian dan perikanan serta memperkuat konektivitas antara petani, nelayan, dan pasar.

“Kami akan terus membangun dan memperbaiki infrastruktur, mulai dari jalan, irigasi, hingga fasilitas pendukung lainnya. Dengan akses yang lebih baik, petani dan nelayan bisa lebih mudah memasarkan hasil panennya dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Burhanuddin juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung visi Bombana yang lebih maju. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perikanan, akan menjadi prioritas dalam RKPD mendatang.

“SDM yang terampil adalah kunci keberhasilan pembangunan. Kita ingin menciptakan masyarakat yang inovatif dan produktif, yang mampu mengelola sumber daya dengan lebih baik dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” ujar Burhanuddin.

FKP ini menjadi ajang diskusi terbuka bagi berbagai pihak untuk menyampaikan

gagasan, harapan, dan tantangan dalam penyusunan RKPD 2026. Melalui forum ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Saya mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dan memberikan masukan konstruktif. Bersama-sama, kita wujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bombana,” tutupnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjalankan perencanaan pembangunan yang inklusif dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, RKPD 2026 diharapkan menjadi landasan utama dalam mewujudkan Bombana yang lebih maju dan berdaya saing.

Gelar Jumat Bersih, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang Laksanakan Gotong Royong Bersihkan Pasar Toburi

Bombana, SultraNET. | - Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang menggelar kegiatan Jumat Bersih dengan melakukan gotong royong membersihkan Pasar Rakyat Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana. Jumat (14/03). Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, Serka Zainal, yang memimpin kegiatan ini menekankan pentingnya kebersihan lingkungan pasar sebagai pusat aktivitas masyarakat.

“Kebersihan pasar harus dijaga agar tetap nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Kegiatan gotong royong ini juga memperkuat rasa kebersamaan antara

TNI dan masyarakat,” ujarnya.



Kepala Desa Toburi, Rahman, mengapresiasi inisiatif Babinsa dalam kegiatan tersebut. “Kami sangat berterima kasih atas kepedulian dan kontribusi Koramil 1431-03/Poleang dalam menjaga kebersihan pasar. Semoga kegiatan ini terus berlanjut secara rutin,” ucapnya.

Sementara itu, Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlan, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong kegiatan serupa di berbagai tempat.

“Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, terutama di fasilitas umum seperti pasar,” pungkasnya.

Polsek Lantari Jaya Gelar Pasar Murah, Bantu Warga Dapatkan

Sembako Murah

Bombana, sultranet.com - Polsek Lantari Jaya kembali mengadakan pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini berlangsung di Desa Watu-Watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, pada Jumat, 14 Maret 2025. Sebanyak 1.000 paket sembako disiapkan dalam kegiatan sosial ini.

Kapolsek Lantari Jaya, IPDA Prasetyo Nento, menggandeng sejumlah pihak dalam penyelenggaraan pasar murah, termasuk PT JBM, PT PAG, CV, serta Toko Ahmad Mas. Ini merupakan kali kedua Polsek Lantari Jaya menggelar pasar murah setelah sebelumnya sukses diselenggarakan di Kecamatan Rarowatu Utara dengan 600 paket sembako dan di Kecamatan Lantari Jaya dengan 400 paket sembako.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meringankan beban ekonomi warga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Pasar murah ini menjadi bukti kepedulian serta sinergi antara kepolisian, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan sosial di wilayah Lantari Jaya dan sekitarnya.

Kapolsek IPDA Prasetyo Nento menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Kami berterima kasih kepada mitra-mitra yang telah bersinergi dalam kegiatan ini. Pasar murah ini bukan hanya tentang distribusi sembako, tetapi juga tentang kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama,” ujar IPDA Prasetyo Nento.

Ia juga berharap bahwa sembako yang dibeli warga dari pasar murah ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga serta membantu meringankan beban ekonomi mereka.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlangsung secara berkelanjutan. Kepolisian berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan membantu dalam berbagai aspek, termasuk kesejahteraan sosial,” tambahnya.



Pasar murah ini mendapat respons positif dari masyarakat. Warga Desa Watu-Watu antusias mengikuti kegiatan tersebut, mengantre sejak pagi untuk mendapatkan paket sembako dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Salah satu warga, Siti, mengungkapkan rasa syukurnya atas adanya pasar murah ini.

“Alhamdulillah, sangat membantu kami. Harga beras dan minyak goreng lebih murah, jadi kami bisa sedikit menghemat,” katanya.

Dengan adanya pasar murah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga barang di pasaran. Kepolisian bersama pihak swasta berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan sosial serupa guna menjaga kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana.

Pemkab Bombana Komitmen Benahi Tata Kelola Keuangan Daerah

Bombana, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah usai menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rapat Exit Meeting yang digelar di Kantor Bupati Bombana, Jumat, 14 Maret 2025.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, H. Burhanuddin, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, serta dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat teknis lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian proses audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 oleh BPK.

Ketua Tim Auditor BPK Sultra menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, masih ada sejumlah catatan yang memerlukan perhatian serius.

“Tahun ini kami melihat kemajuan yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian, khususnya dalam penguatan sistem pengendalian internal, transparansi pelaporan anggaran, serta pengelolaan aset daerah,” ujar Ketua Tim Auditor BPK Sultra dalam penyampaiannya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dedikasi tim BPK selama proses audit berlangsung. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti demi menciptakan tata kelola yang lebih baik dan bertanggung jawab.

“Kami menyadari masih banyak yang perlu dibenahi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk memperbaiki seluruh temuan serta menjadikan rekomendasi BPK sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan program keuangan daerah ke depan,” tegas

Burhanuddin.

Dalam forum tersebut, suasana dialog berlangsung terbuka antara tim auditor BPK dan para pimpinan OPD. Berbagai catatan hasil pemeriksaan dibahas secara rinci, mulai dari evaluasi sistem pengendalian anggaran, tertib administrasi aset, hingga efektivitas pelaporan keuangan lintas sektor.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat dijalankan dengan optimal. Ia juga menekankan perlunya pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan.

“Kami akan memastikan seluruh tindak lanjut dapat terlaksana dengan baik, sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi lebih efektif, tertib, dan sesuai prinsip akuntabilitas,” ujar Ahmad Yani.

Sebagai bagian dari penutupan rapat, Ketua Tim Auditor BPK Sultra secara simbolis menyerahkan laporan hasil audit kepada Bupati Bombana. Penyerahan ini menjadi penanda komitmen bersama antara BPK dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan berkelanjutan.

Langkah-langkah perbaikan yang akan ditempuh Pemkab Bombana diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah. Dengan dukungan seluruh perangkat daerah, Pemkab Bombana optimistis mampu membangun sistem keuangan yang semakin kuat dan kredibel.

Rapat Exit Meeting ini sekaligus menjadi ruang refleksi dan evaluasi bersama, bahwa akuntabilitas publik tak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian penting dari kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Safari Ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara, Bawa Pesan Pembangunan

Kolaka Utara, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melanjutkan rangkaian Safari Ramadhan di Kecamatan Wawo dan Kecamatan Katoi. Kegiatan ini menjadi momentum bagi Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., dan Wakil Bupati, H. Jumarding, SE., untuk menyampaikan pesan pembangunan serta mempererat hubungan dengan masyarakat dalam suasana penuh kebersamaan. Kamis (13/3/2025)

Bupati Kolaka Utara melaksanakan Safari Ramadhan di Masjid Raya Nurut Taqwa, Kecamatan Wawo. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan rasa kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks.

“Selain merangkul seluruh masyarakat guna membangun Kolaka Utara yang lebih baik, kita juga harus bersama-sama mengembangkan dan memelihara ekonomi masyarakat. Semua ini kembali kepada kita untuk mewujudkannya. Mari menjalin silaturahmi demi kemajuan daerah kita,” ujar Bupati.

Sementara itu, Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., melaksanakan Safari Ramadhan di Masjid Raya Katoi, Kecamatan Katoi. Ia menekankan bahwa Ramadan bukan hanya sekadar ibadah spiritual, tetapi juga momentum untuk meningkatkan keimanan, kejujuran, dan mempererat hubungan sosial.

“Mari sama-sama membangun Kolaka Utara ke arah yang lebih baik lagi dengan semangat kebersamaan dan keikhlasan,” kata Wakil Bupati.

Selain mendukung pembangunan ekonomi, kegiatan Safari Ramadhan juga dimanfaatkan untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam setiap kunjungan, Bupati dan Wakil Bupati turut mendengarkan masukan serta harapan warga terkait berbagai program pembangunan daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menyampaikan bahwa Safari Ramadhan ini menjadi salah satu program Pemkab Kolaka Utara dalam menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan program-program pembangunan daerah secara lebih dekat.

“Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus berupaya memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui berbagai program, salah satunya Safari Ramadhan ini. Harapannya, masyarakat dapat lebih memahami arah kebijakan pemerintah dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera,” ujar Syahlan.

Safari Ramadhan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, diharapkan masyarakat semakin berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Kegiatan ini juga diisi dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di bulan suci ini dan semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan warga.